



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI VI DPR RI
KE SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 17 S.D 21 DESEMBER 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2021



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VI DPR-RI
DI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 17 S.D. 21 DESEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Undang-Undang No. 13/2019 dan pasal 60 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib mengatur bahwa komisi dalam melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat dapat melakukan kunjungan kerja dalam masa sidang.

Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 – 2022.

B. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI adalah PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Surabaya Provinsi Jawa Timur.

C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha.

Secara khusus, kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk di Surabaya Provinsi Jawa Timur.






D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan ke PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN	FOTO
1.	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMP. F. PKB	
2.	A-161	DARMADI DURIANTO	F. PDIP	
3.	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F. PDIP	
4.	A-209	SONNY T. DANAPARAMITA	F. PDIP	
5.	A-232	I NYOMAN PARTA, S.H.	F. PDIP	
6.	A-208	dr. H. MUFTI A.N ANAM	F. PDIP	
7.	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.	F.PG	
8.	A-302	NUSRON WAHID	F.PG	
9.	A-321	Dra.Hj. HAENY RELAWATI RINI. W., M.Si	F. PG	
10.	A-65	ANDRE ROSIADE	F. GERINDRA	
11.	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F. GERINDRA	
12.	A-135	HENDRIK LEWERISSA, SH, LLM	F. GERINDRA	
13.	A-115	KHILMI	F. GERINDRA	
14.	A-361	ZURISTYO FIRMA DATA, SE., M.M	F. NASDEM	
15.	A-36	Ir. H. M. NASIM KHAN	F.PKB	

16.	A-544	DR.Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F. PD	
17.	A-554	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc	F. PD	
18.	A-447	AMIN AK, M.M.	F. PKS	
19.	A-485	H. JON ERIZAL, SE., MBA	F. PAN	
20.	A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S,Sos	F-PAN	

F. HASIL KUNJUNGAN

Hasil Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. PT PERTAMINA GAS NEGARA (PERSERO)

PT Pertamina Gas Negara Tbk sebagai *Subholding* Gas Pertamina terus memperkuat posisinya di industri dengan melakukan konsolidasi industri gas bumi nasional melalui berbagai kegiatan untuk mencapai 23% bauran energi dalam negeri.

a. Jargas Rumah Tangga

Secara umum pembangunan Jargas APBN di area Jawa Timur *ahead schedule*. Namun demikian terdapat *concern* di beberapa area terkait perijinan dengan BBWS, Jalan Propinsi, BPJN, dan Pemerintah Daerah. Diperlukan Support Perijinan dengan Pemilik Lahan dan Instansi Terkait.

Total Pengelolaan jargas ini adalah 560.196 SR untuk APBN Tahun 2021 sebanyak 21 Kabupaten/Kota adalah 126.876 SR yaitu :

- Nomor Paket :14, Jargas Bojonegoro, Lamongans sebanyak 16.435 SR
- Nomor Paket :15, Jargas Surabaya, Sidoarjo sebanyak 19.506 SR
- Nomor Paket :16, Jargas Kota Mojokerto, Kab Mojokerto, Jombang Sebanyak 18.271 SR

- Nomor Paket :17, Jargas Kab Pasuruan, Kota Pasuruan sebanyak 12.753 SR
- Nomor Paket :18, Jargas Kab Probolinggo, Kota Probolinggo sebanyak 10.817 SR

Rencana Penambahan Tahun 2021 di Jawa Timur : 11.000 SR

b. Strategi Pengembangan Pasar SOR 3

1. Demand Gas Bumi di Area Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebar mulai dari utara ke selatan. Namun Infrastruktur Pipa Gas terkonsentrasi di bagian Utara.
2. Saat ini terdapat potensi *demand* sampai dengan 20 BBTUD di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dapat dilayani tetapi jauh dari pipa gas eksisting. Moda transportasi *beyond pipeline* menggunakan LNG dan CNG *trucking* dapat digunakan untuk menjangkau potensi *demand* tersebut.
3. Sinergi dengan kawasan industri : Kawasan eksisting: 17 Kawasan industri eksisting di Jateng dan Jatim dengan 149 Pelanggan Komersial dan Industri dan Kawasan baru: Aviarna (Jateng), Jakamitra (Jatim).

c. Inovasi-Digitalisasi dalam Manajemen Infrastruktur dan pengembangan bisnis

Prinsip-prinsip *ICT (Information & Communication Technology)*
Subholding Gas

1. Pemanfaatan *ICT* untuk sinergi dan integrasi PGN Group.
2. Inovasi *ICT* mendorong produktifitas, optimalisasi proses bisnis dan sebagai sarana kontrol.
3. Penerapan teknologi baru dan berbagi pakai (*shared service*) guna memberikan manfaat seluas- luasnya dan mendorong optimalisasi dan efisiensi bagi PGN Group

Digitalisasi Smart meter: Mengotomasi proses dan Memiliki keunggulan

- Buka Tutup secara remote
- tingkat akurasi lebih tinggi,
- data dicatat secara cepat

- Dapat mengurangi penunggakan pembayaran pelanggan

Tahap Implementasi

- a. Piloting: 1877 Smart Meter (2021)
- b. Integrasi data, pengembangan aplikasi dan dashboard (2021)
- c. Implementasi: 1 Juta Smart Meter (2022)
- d. Model bisnis: Managed Service

d. Kerjasama SHG dengan Pemerintah Jawa Timur

Kerjasama Pertamina Gas Negara dan Petrogas Jawa Timur adalah

1. Kerjasama dalam penyediaan gas di Kawasan hunian komersial
2. Kerjasama dalam penyediaan gas di Kawasan industri
3. Kerjasama pembangunan jaringan telekomunikasi dan layanan ICT untuk mensukseskan industry 4,0

Sehingga dapat disimpulkan kehadiran PGN bisa berperan, bersinergi dan memberi manfaat kepada masyarakat khususnya untuk masyarakat di Jawa Timur, seperti:

1. PGN berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission.
2. PGN Aktif bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam rangka percepatan pengembangan Infrastruktur gas bumi.
3. Inovasi dalam bentuk Integrasi Infrastruktur Pipa – Non Pipa dan Digitalisasi guna meningkatkan produktifitas dan optimalisasi proses bisnis. PGN mendukung program Pemerintah dalam rangka menurunkan subsidi LPG melalui pengembangan infrastruktur Jaringan Gas Rumah Tangga.

2. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

a. Kondisi keuangan UID Jawa Timur

Terjadi kenaikan Beban Usaha di November 2021 ini jika dibandingkan dengan Desember 2020 disebabkan kontribusi Pembelian Tenaga Listrik yang meningkat. Hal ini selaras dengan Growth Penjualan Tenaga Listrik s.d November yang tumbuh positif mencapai 4.05 % jika dibandingkan dengan penjualan November 2020.

Total Jumlah Aset PLN UID Jawa Timur s.d November 2021 sebesar 33.9 Triliun rupiah mengalami kenaikan sebesar 1,31 % atau sebesar 437 M jika dibandingkan dengan Jumlah Aset di Desember Tahun 2020.

Saldo laba PLN UID Jawa Timur s.d November 2021 sebesar 7,3 Triliun dengan hutang jangka Panjang sebesar 1,5 Triliun Rupiah dan hutang jangka pendek sebesar 3,6 Triliun Rupiah.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020, memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan PLN UID Jawa Timur Kinerja Growth Penjualan, Pelanggan dan Daya tersambung mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan Growth di 5 tahun terakhir. Namun di tahun 2021, kinerja penjualan, delta pelanggan dan daya tersambung menunjukkan growth positif yang cukup baik, naik jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Terjadi pergeseran kontribusi penjualan tenaga listrik tahun 2020 terhadap tahun 2016 s.d tahun 2019 khususnya pada Tarif Industri dan Rumah Tangga. Tahun 2016-2019 Industri memberikan kontribusi terbesar penjualan TL sekitar 42 % s.d 43 %, namun pada tahun 2020, tarif industry hanya memberikan kontribusi penjualan sebesar 39.84 %. Tahun 2020, tarif rumah tangga memberikan kontribusi penjualan terbesar hingga mencapai 41.10%. Hal ini merupakan salah satu dampak dari terjadinya Pandemi COVID-19.

Namun, pada Nopember 2021, tarif industri telah kembali memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 41,56% disusul oleh Tarif Rumah Tangga sebesar 39,86%

Tarif Rumah Tangga mulai mengalami penurunan penambahan pelanggan sejak tahun 2020 s.d 2021 hal ini menunjukkan titik kejenuhan untuk penambahan pelanggan di wilayah PLN UID Jawa Timur. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh Dampak Pandemi COVID-19.

Tarif Bisnis mengalami penurunan penambahan pelanggan sejak tahun 2018 s.d 2020, namun kembali tumbuh positif delta pelanggan bisnis di tahun 2021

Terjadi pergeseran kontribusi penjualan tenaga listrik tahun 2020 terhadap tahun 2016 s.d tahun 2019 dimana pada tahun 2020 pertumbuhannya -5,21% Namun, pada September 2021, pendapatan telah bergerak ke tren positif dibandingkan Tarif Rumah Tangga, Sosial, Industri, Bisnis, dan lainnya mulai mengalami penurunan pendapatan sejak tahun 2020 s.d 2021 hal ini menunjukkan masih terdapatnya Dampak Pandemi COVID-19.

Pendapatan total pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

b. Inovasi

Agar Sektor Transportasi Bertransisi Menuju *Low Carbon* Maka Diperlukan Pergeseran Dari BBM Menjadi Listrik

1. Dengan konsumsi BBM yang meningkat, produksi minyak semakin menurun. Hal ini akan menambah defisit neraca perdagangan tahun 2030 sekitar Rp 500 triliun/tahun, dan terus di 2060 defisit lebih dari Rp 1.000 trilliun/tahun.
2. Proses dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan di tahun 2060 akan mencapai carbon neutral.
3. Pergeseran dari energi BBM menjadi energi listrik mengubah energi import menjadi energi domestik sekaligus mengurangi emisi karbon pada sektor transportasi
4. Penetrasi mobil dan motor listrik sebesar 90% pada tahun 2060 untuk mencapai kondisi carbon neutral pada sektor transportasi.

Konversi kompor LPG ke kompor induksi mengurangi impor, mengurangi subsidi dan menurunkan emisi Co2

1. Konsumsi LPG terus meningkat dan subsidinya mencapai Rp50T hingga Rp60T per tahun.
2. Peningkatan konsumsi LPG masyarakat terus meningkat setiap tahun, dan mengakibatkan subsidi yang diperlukan semakin besar.
3. Kompor LPG juga menghasilkan emisi karbon CO2.
4. Mengonversi kompor LPG dengan kompor induksi akan menurunkan subsidi impor.
5. Ketika sumber energi listriknya semakin bersih dan berbasis produksi domestik, manfaat akan berdampak signifikan dalam menggerakkan ekonomi yang lebih berkualitas.

c. Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur

Sinergi PLN dengan Pemprov dan Instansi Lain

1. MoU dengan Instansi dan Lembaga dengan melakukan MoU Kejari & Kejati, Mou TNI Polri utk pengamanan, MoU dengan BPN utk sertifikasi asset dan MoU dengan Pemkab Sumenep dalam rangka operasi pembangkit kepulauan
2. Program peningkatan rasio elektrifikasi dengan Pemprov (Dinas ESDM) melalui Bantuan Listrik Gratis utk Masyarakat Pra Sejahtera dengan PLN Peduli, Anggaran Propinsi (ESDM) dan CSR Instansi lain.

PT PLN (Persero) senantiasa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun Lembaga pemerinta lainnya serta dengan mitra – mitra terkait.

Bentuk sinergi telah dilakukan Bersama instansi – instansi dan Lembaga – Lembaga: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, TNI dan Polri. Selain itu dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi, PT PLN (Persero) memberikan bantuan listrik gratis untuk masyarakat Pra Sejahtera melalui: PLN Peduli, Anggaran Provinsi dan CSR Lainnya.

d. Project-Project Yang Selesai Di Wilayah Jatim S.D. November 2021

1. Transmisi KMS

1. SUTT 150 KV KIS-Bangil (KTT) : 10,55
2. SUTT 150 KV Gempol/New Porong-KIS (KTT) : 15,30
3. SUTT 150 KV Gempol/New Porong – Bangil : 11,39
4. Rekonduktoring SUTT 150 KV Paiton - Kraksaan Sirkit I : 19,84
5. Rekonduktoring SUTT 150 KV Paiton - Kraksaan Sirkit II : 19,84
6. Rekonduktoring SUTT 150 KV Paiton - Kraksaan Sirkit II : 19,84
7. Rekonduktoring SUTT 150 KV Kraksaan – Probolinggo : 58,87
8. SUTT Wlingi II - Tulungagung II : 76,33
9. SUTT Kediri - Tulungagung II : 66,38
10. SUTT 150kV Tanggul-Puger (KTT) : 53,07

2. Gardu Induk (MVA)

1. GI 150 KV KIS (KTT) :60
2. GI 150 KV Tulungagung : 60
3. GI New Porong :60
4. GI New Porong :60
5. GIS Buduran : 60

3. KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

a. Perkembangan Inflasi menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022

Komoditas Pendorong Inflasi Pangan Bergejolak (*Volatile* Pada Nataru 2018 pendorong inflasi pangan terbesar bersumber dari komoditas daging ayam, telur ayam dan bawang merah dengan andil inflasi masing masing sebesar 0,07%,0,09%, dan 0,05%. Pada Nataru 2019 inflasi pangan disumbang oleh telur ayam dan bawang merah (0,08% dan Pada Nataru 2020, inflasi pangan didorong oleh kenaikan harga cabai dan telur ayam Pada Nataru 2021, diprediksi inflasi akan bersumber dari kenaikan harga minyak goreng dan cabai di mana tren kenaikan masih terus terjadi.

b. Perkembangan harga nasional menjelang Natal dan Tahun Baru 2022

Secara umum kondisi harga barang kebutuhan pokok dalam kondisi stabil, kecuali minyak goreng dan cabai. Penyebab Kenaikan Minyak Goreng Kenaikan harga minyak goreng didalam negeri dipicu oleh kenaikan harga CPO dunia (CPO Dumai) yang masih terus terjadi hingga menembus level tertinggi, di minggu ke-1 Desember harga CPO Dunia (Dumai) mencapai Rp.12.333/Liter, harga tersebut lebih tinggi 45,73% dibanding Desember 2020. Harga Cabai mengalami peningkatan dipicu oleh menurunnya *supply* karena masa panen diberbagai sentra produksi sudah memasuki fase akhir.

c. Rapat Koordinasi Nasional Terkait Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Tanggal 15 November 2021

Laporan dari Pemerintah Daerah, stok tersedia secara cukup hingga selesai masa HBKN dan Nataru 2021/2022 dengan harga yang stabil, kecuali Minyak Goreng dan daging ayam ras yang harganya mulai naik dan Cabai yang mulai memasuki masa paceklik. Adapun bawang merah sedang mengalami panen raya sehingga adapoten siharga anjlok.

Perum Bulog dan Pelaku Usaha Pangan, stok tersedia secara mencukupi, namun perlu dimitigasi kemungkinan gejolak harga lanjutan, akibat permintaan yang mungkin meningkat, serta siap untuk berkoordinasi lebih lanjut. Khusus minyak goreng, saat ini telah dilakukan upaya untuk memasok minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter seharga Rp14.000/liter melalui ritel modern sebagai upaya untuk meredam gejolak harga.

Satgas Pangan, siap untuk mengawal pasokan barang kebutuhan pokok keseluruh wilayah Indonesia dan melakukan penindakan terhadap oknum pelaku usaha yang melakukan aksi spekulasi atau penimbunan menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Pelaku usaha Mall/Pusat Perbelanjaan, siap untuk terus melaksanakan Protokol Kesehatan secara ketat dipusat perbelanjaan

dand epartmen store dalam rangka mewaspadaai kemungkinan terjadinya gelombang ke-III Covid-19.

d. Sinergi Kementerian Perdagangan dengan pemerintahan Provinsi JawaTimur

- Melindungi Produk dalam negeri
 - Kementerian Perdagangan (melaluiBPTN Surabaya)selama Periode Januari –Desember 2021 bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur melakukan pemantauan dan pengawasan komoditi BAPOKTING di wilayah Jawa Timur.
 - Kementerian Perdagangan akan mewujudkan kerja sama yang sinergis dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, penegakan hukum, dan pengamanan di bidang perdagangan
- Pengawasan & Pemeriksaan Barang Impor 853 PIB dari 137 Perusahaan)
Kategori pelanggaran:
 1. 617 PIB dengan Kategori Tidak Ada Pelanggaran,
 2. 37PIB dengan Kategori Alamat Tidak Ditemukan,
 3. 52PIB dengan Kategori Melebihi Alokasi,
 4. 52PIB dengan Kategori Salah Mencantumkan Dokumen Perijinan,
 5. 41PIBdenganKategoriSalahMencantumkanSatuan,
 6. 49PIBdenganKategoriTidakMemilikiPersyaratanImpor.Rekomendasi sanksi:
 1. 25 Perusahaan direkomendasikan diberikan sanksi adminstratif berupa peringatan tertulis,
 2. 15 Perusahaan direkomendasikan Pemblokiran Akses Kepabeanan,
 3. 8 Perusahaan direkomendasikan diberikan surat perintah penarikan dan pemusnahan barang.

e. Neraca Perdagangan Indonesia

Neraca perdagangan Indonesia bulan Oktober 2021, perkembangan neraca perdagangan Indonesia ditengah pemulihan ekonomi global pada oktober 2021 mengalami surplus USD 5,73 miliar, sehingga surplus di bulan Januari – Oktober 2021 mencapai USD 30,81 miliar.

Perkembangan struktur ekspor Indonesia Januari-Oktober 2021 adalah struktur ekspor Indonesia didominasi oleh sektor industri dengan kontribusi di Januari-Oktober 2021 mencapai 77,16 % dari total ekspor Indonesia.

Di Januari-Oktober 2021 ekspor sektor Migas naik 52,24 % sektor pertambangan naik 87,70 %, sektor industri naik 35,53 % dan sektor Pertanian naik 5,17 % (YoY)

4. PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

a. Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh Pelindo

Dengan dimulainya merger tentu saja akan ada banyak perubahan yang terjadi dibandingkan dengan sebelum integrasi. Mulai dari kapasitas layanan, struktur dan sistem, dan masih banyak lainnya. Penasaran,sebelum merger ada empat entitas Pelindo, yakni Pelindo I, Pelindo II/IPC, Pelindo III, dan Pelindo IV yang beroperasi berdasarkan cakupan wilayah.

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV melakukan transformasi beberapa Pelabuhan kelolaannya sambil terus mengembangkan sejumlah Pelabuhan yang masuk ke dalam proyek strategis nasional. Hal itu dilakukan dalam rangka persiapan proses integrasi badan usaha milik negara (BUMN) Pelabuhan, sedang memacu penyelesaian beberapa proyek strategis nasional di wilayah operasinya, seperti Bali *Maritime Tourism Hub (BMTH)*, Terminal Kalibaru, Terminal teluk Lamong, Terminal Kijing dan Makassar *New Port (MNP)*.

Pada semester I/2021, Makassar *New Port* telah melayani 203 *call* atau kunjungan kapal dengan 85.913 *TEUs* atau telah mencapai 75,58 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun ini. Dengan begitu, secara keseluruhan Makassar New Port (MNP) telah melayani 798 *call* dengan 315.832 *TEUs* sejak beroperasi pada November 2018. Selain MNP, Pelindo IV juga tengah menggarap pengembangan dan transformasi Pelabuhan Sorong dengan nilai investasi Rp165,98 miliar.

Hingga kini, progress pengerjaan fisiknya telah mencapai 25 persen dengan pekerjaan pembangunan dan perkerasan *container yard* (CY), termasuk kegiatan timbunan, penghamparan material LPB, dan pemasangan *geotextile*. Untuk meningkatkan produktivitas Pelabuhan Sorong, perusahaan juga telah menambah dua unit *container crane* (CC), dan dua unit *rubber tyred gantry* (RTG) *crane*. Saat ini, perusahaan juga tengah dilakukan pembangunan Bitung *International Hub Port* yang telah rampung dan sudah dioperasikan. Setelahnya, akan dilakukan pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung secara bertahap untuk lapangan penumpukan dan dermaga peti kemas, serta proses penyelesaian Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Bitung.

Proyek strategis nasional berikutnya yang berada di wilayah Pelindo IV adalah rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan di Teluk Palu yang merupakan sinergi dengan Kementerian BUMN, yakni Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Pantoloan, dan Terminal Wani. Rencananya, proyek tersebut akan dibiayai dengan menggunakan *Asian Development Bank* (ADB) *loan* untuk studi dan pembangunan konstruksinya. Pengerjaannya sendiri sedang tahap *feasibility study*, RIP, dan penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang telah rampung, serta menunggu penetapan dari Kementerian Perhubungan dengan total nilai proyek sebesar Rp1,11 triliun. Transformasi di Pelabuhan Ambon meliputi beberapa inisiatif, di antaranya perombakan proses bisnis, peralatan dan fasilitas, sistem IT, struktur organisasi, pengukuran kinerja, dan peningkatan kualitas SDM. Langkah tersebut diharapkan bisa memberikan peningkatan produktivitas

Cabang Ambon menjadi 25 box per *ship per hour*, dan memangkas *working time* dari 3 hari menjadi 1 hari. Hasil dari transformasi itu juga akan memangkas biaya bagi pemilik kapal dan barang menjadi lebih efisien. Transformasi Cabang Ambon dilaksanakan untuk mendukung kesiapan infrastruktur terkait rencana menjadikan Provinsi Maluku sebagai lumbung perikanan nasional.

b. Tingginya Biaya Logistik Nasional Dibandingkan Negara Lain Penyebab tingginya biaya logistik Indonesia

Transportasi dan Inventory carrying cost

1. Transportasi

- Belum optimalnya layanan, dan infrastruktur transportasi, menyebabkan rendahnya performa dan meningkatkan waktu transportasi dan *overhead cost*
- Terpusatnya produksi barang di Indonesia, utilisasi *backhaul* rendah & perlu dicover dengan biaya tambahan untuk pengiriman

2. *Inventory carrying cost*

Masih rendahnya reliabilitas jasa logistic di Indonesia menyebabkan cargo owner memegang inventori lebih tinggi dari titik optimal. Rantai Logistik yang Belum Optimal.

5. PT BUKIT ASAM, TBK

PT Bukit Asam Tbk memiliki sejarah yang sangat panjang di industri batu bara nasional. Operasional perusahaan ini ditandai dengan beroperasinya tambang Air Laya di Tanjung Enim tahun 1919 oleh pemerintah kolonial Belanda. Kala itu, penambangan masih menggunakan metode penambangan terbuka.

Di tengah kecenderungan harga batu bara dunia yang menurun, Perusahaan tetap berkomitmen untuk meningkatkan laju pertumbuhan

produksi batu bara. Komitmen ini dibuktikan dengan terus meningkatnya produksi batu bara secara konsisten, yang diikuti dengan peningkatan kapasitas angkutan kereta api. Hal ini terlihat dari Compound Annual Growth Rate (CAGR) produksi dan kapasitas kereta api dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, masing-masing sebesar 8,80% dan 11,31%. Peningkatan kapasitas angkutan kereta api merupakan bagian dari klausula perjanjian pengangkutan batu bara dengan PT KAI (Persero). Perjanjian ini juga turut mendorong Perusahaan untuk terus meningkatkan produksi dengan menerapkan strategi produksi terintegrasi, yaitu fokus pada aspek efisiensi, kualitas produksi, serta menjaga ketersediaan batu bara pada level yang optimal tanpa mengesampingkan penerapan prinsip-prinsip aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

Anak Perusahaan/afiliasi PT BPI dan PT HBAP berkontribusi terhadap pendapatan Perseroan melalui serap laba sesuai porsi kepemilikan saham Perseroan. Ditahun 2019, laba komprehensif PT BPI dan PT HBAP masing-masing sebesar Rp202,25 miliar dan Rp132,54 miliar. Sehingga kontribusi keuntungan bagi Perseroan ditahun berjalan sebesar Rp179,45 miliar.

Produksi batu bara di tahun 2019 terealisasi sebesar 29.068.924 ton yang terdiri dari produksi Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTe) sebesar 28.075.437 ton, produksi Unit Pertambangan Peranap sebesar 4.445 ton, dan PT Internasional Prima Coal (IPC) sebesar 989.042 ton. Pencapaian produksi di tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar 10% dari pencapaian produksi tahun sebelumnya. Dalam rangka optimasi penjualan atas batu bara milik sendiri, maka Perseroan di tahun 2019 tidak melakukan pembelian batu bara.

a. Pengangkutan

Perusahaan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) dalam proses pengangkutan batu bara dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan Lampung dan Dermaga Kertapati, Palembang. Proses yang dilalui dalam pengangkutan batu bara meliputi:

- Pengaturan jumlah dan kualitas muatan batu bara yang akan dimuat ke dalam setiap gerbong kereta api melalui *Train Loading Station (TLS)*.
- Pengawasan dan pencatatan distribusi batu bara menuju Pelabuhan atau Dermaga.
- Pelaksanaan bongkar muat batu bara dari gerbong kereta api menggunakan *Rotary Car Dumper (RCD)* di Pelabuhan Tarahan dan *Apron Feeder (AF)* di Dermaga Kertapati.

b. Penjualan

Penjualan produk batu bara masih didominasi untuk memenuhi kebutuhan pasar batu bara domestik, dengan komposisi mencapai 60,00% dibandingkan keseluruhan volume penjualan di tahun 2019. Untuk mendorong pertumbuhan pendapatan atas penjualan yang dilakukan, Perseroan berupaya untuk mendorong penjualan ekspor ke berbagai negara seperti India, Hongkong, Filipina, dan sejumlah negara Asia lainnya. Selain itu, Perseroan juga berupaya menerapkan penjualan produk batu bara Medium to High Calorie kepada pasar premium, dengan tujuan memperbesar margin dan meningkatkan kinerja laba.

Total Sumber Daya: 5,81 milyar ton, Total Cadangan Tertambang: 3,07 milyar ton. Pasokan ke PLN Group Realisasi s.d Nov'21 sebesar 11,64 Juta ton atau sebesar 104% dari rencana alokasi s.d Nov'21 (*Year To Date*) dan Total Rencana Investasi FY 2021 : Rp 3.840 Miliar Total Realisasi Investasi s.d 30 November 2021 : Rp 1.641 Miliar.

c. Summary Project Coal to DME

Objective:

Pengembangan Project Coal to DME Untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional dengan men-substitusi porsi LPG impor dengan DME yang dihasilkan dari batubara.

d. Nilai Tambah Proyek Coal to DME bagi Negara:

1. Menarik investasi USD 2,1 Milyar;
2. Utilisasi *low rank coal* selama 30 tahun atau 180 juta ton;
3. Menghemat cadangan devisa dan neraca perdagangan dengan pengurangan impor LPG sebesar ~1 juta ton /tahun;
4. Adanya *multiplier effect* berupa manfaat langsung yang didapat pemerintah selama 30 tahun dari penerimaan pajak dan non pajak
5. Memberdayakan industri nasional dengan melibatkan tenaga lokal dengan penyerapan jumlah tenaga kerja
6. Meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG

6. MINING INDUSTRY INDONESIA (MIND ID)

a. Profil MIND ID

- ANTAM

Kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara (60%)

- Bukit Asam

PTBA memiliki sejarah yang panjang dalam membangun industri batubara di Indonesia, dengan fokus pada kegiatan eksplorasi, produksi dan penjualan batubara (65,93 %)

- PT Freeport Indonesia

PTFI melakukan kegiatan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua (51,23 %)

- Inalum

PT Inalum bergerak di bidang peleburan aluminium (aluminium smelter), dan menjadi pionir dalam penggunaan listrik tenaga air yang bersumber dari air Danau Toba (100%)

- Timah

PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran (65%)

- Mind Id (100%) dan Value (100%) statusnya sebagai akuisisi baru.

b. Tema Strategis MIND ID 2020-2024

Perusahaan Kelas Dunia dengan Penguasaan Cadangan, Pengembangan Bisnis Hilirisasi dan Kepemimpinan Pasar.:

- Meningkatkan Pertumbuhan Eksplorasi & Produksi secara Agresif
- Meningkatkan Daya Saing Biaya melalui Digital
- Membangun Aset Hilirisasi Berskala Global
- Aliansi Strategis untuk Ekspansi Bisnis Baru Hilirisasi

c. *The Functional Leader drives functional excellence:*

- Keunggulan Financial: Pendanaan External dan internal, Optimasi perpajakan Memperkuat fungsi perusahaan sebagai kesatuan, keahlian (*center of excellence*) khususnya pada dan posisi kritical untuk peningkatan kinerja bisnis
- Pengembangan strategi: Peran aktif dalam pengembangan strategi Perusahaan, *Support services* disatukan dalam fungsi *shared services centers* (dan/atau melalui *outsourcing*)
- Fungsi dan Sumber daya korporat: Sentralisasi asset, Pengurangan biaya melalui *shared services*, Keunggulan SDM: Fungsi korporat

dengan memperkuat proses korporasi, penetapan kebijakan, penyediaan tenaga ahli, penciptaan inisiatif-inisiatif fungsional dan mendorong adanya sharing praktik bisnis terbaik.

- Sinergi bisnis: Sinergi berdasarkan sharing pengalaman *best-practice* Garis pelaporan yang solid dari fungsi desentralisasi menjadi fungsi terpusat (sentralisasi).
- Kerikatan Operasional: Keterlibatan bergantung pada potensi sinergi dalam portfolio bisnis: Tetap mempertahankan hak keputusan operasional di level Business Unit, namun dibungkus dalam kebijakan dan proses korporasi yang terintegrasi.

d. Ringkasan Fungsi P3MO MIND ID

Konsep P3MO (Portfolio, Program, *Project Management Office*) adalah integrasi proses, mulai penurunan portofolio menjadi program/ proyek, pelaksanaan & pengawasan program/ proyek dan evaluasi benefit dan Penurunan visi dan misi serta strategi MIND ID (merupakan aktivitas portfolio management MIND ID) menjadi program/proyek strategis yang kemudian dijalankan oleh Anggota Holding sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas masing-masing Anggota Holding.

e. Kerjasama dengan Pemda Jawa Timur dan Pemda Gresik

- Sinergi dengan PEMDA Jatim & Gresik Koordinasi dan integrasi dengan FORKOPIMDA & FORKOPIMCAM: Peluang kerja dan rekrutmen baik tenaga kerja, skill (Gresikpedia) maupun non-skill (Gresikpedia ataupun BUMDES), Peluang Kerjasama/usaha (kerjasama dengan sub-kontraktor, pasokan barang/jasa, *construction waste management*), CSR (Pelatihan, vaksinasi, pemanfaatan *construction waste*),
- Sinergi dengan BUMN/BUKD, Pasokan listrik dari PLN, Potensi kerjasama dengan PDAM Gresik untuk pasokan air, Potensi kerjasama pasokan gas, Potensi off-take produk dan produk samping. Smelter: Off-take emas oleh ANTAM, Off-take asam sulfat oleh

Petrokimia Gresik/Pupuk Indonesia dan Off-take slag oleh Semen Gresik/Semen Indonesia

7. PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK

a. Perkembangan Dana BRI di Jawa Timur

Pasca Covid di tahun 2020 Simpanan BRI Jatim Tumbuh positif secara yoy sebesar 12.6%. Pada tahun 2021 Simpanan BRI Jatim dari bulan kebulan masih mengalami pertumbuhan positif namun melambat dan sampai dengan November 2021 hanya tumbuh 6.22% atau Rp6.69 Triliun.

Pasca Covid di tahun 2020 Kredit BRI Jatim Tumbuh positif secara yoy sebesar 15.1%. Pada tahun 2021 pinjaman BRI Jatim dari bulan kebulan masih mengalami pertumbuhan positif dan sampai dengan November 2021 telah tumbuh 14.9% atau Rp8.25 Triliun.

b. Penyaluran BPUM

Di Wilayah Jawa Timur Bank BRI mendapatkan alokasi penyaluran BPUM dari Kemenkop & UKM sebanyak 1.126.584 orang penerima yang tersebar kedalam 20 Tahap. Sampai dengan posisi 13 Desember 2021, jumlah penerima yang telah melakukan pemanfaatan dana bantuan/pencairan mencapai 83.23% atau sejumlah 937.669 orang penerima.

Kendala: kurangnya akses informasi bahwa penerima tidak mengetahui bahwa ybs adalah penerima BPUM.

Berdasarkan history kenaikan penyaluran BPUM perbulan berada di kisaran 4-5%, sehingga sisa waktu sampai dengan akhir tahun diperkirakan naik 2% an atau telah mencapai 87%. Terkait dengan 61,166 penerima yang belum tersalurkan, apabila tidak tersalurkan sampai dengan akhir periode penyaluran, maka dana tersebut akan dikembalikan kekas negara.

c. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Pemberdayakan UMKM binaan atau nasabah yang memiliki usaha, menciptakan *business matching* yaitu mempertemukan UMKM dengan pembeli atau calon mitra dari dalam dan luar negeri lewat komunikasi virtual.
2. Inovasi berkelanjutan bagi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). RO Surabaya Memiliki 131 Desa BRILian, sementara RO Malang memiliki 153 desa BRILian.
3. BRI Jatim telah memiliki 2,003 Kluster usaha dengan dominasi RO Malang sebesar 1,891 *cluster* binaan

G. REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan oleh Tim Kunjungan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI bersama ke PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., ada beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Komisi VI DPR RI mengusulkan kepada PT Pertamina Gas Negara (Persero), untuk mensosialisasikan lebih masif lagi terkait adanya kenaikan tarif Jaringan Gas kemasyarakatan luas khususnya para konsumen UMKM di Jawa Timur.
2. Komisi VI DPR RI mengusulkan kepada PT Pertamina Gas Negara (Persero) agar memberikan perhatian kepada UMKM-UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan memberikan Program Bina Lingkungan.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., agar kunjungan kerja berikutnya memberikan laporan keuangan perusahaan periode 5 Tahun kebelakang.

4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., untuk memberikan kemudahan dalam merealisasikan program-program yang ada kepada dimasyarakat.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Pertamina Gas Negara (Persero), Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kementerian Perdagangan RI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, Tbk, *Mining Industry Indonesia (MIND ID)*, PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., saat kunjungan kerja kedepannya agar mitra kunjungan memberikan isi paparan materinya diurutkan terdahulu dari informasi perusahaan yang ada dipusat lalu menyesuaikan informasi kondisi perusahaan yang ada di daerah atau regional-regionalnya dan sudah merumuskan harapan dari perusahaan untuk disampaikan kepada anggota tim kunjungan kerja.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada perusahaan yang sudah melakukan merger seperti *Mining Industry Indonesia (MIND ID)* agar konsolidasi perusahaan yang sudah dilakukan untuk dijaga dengan baik dengan memberikan porsi masing-masing yang merata.
7. Komisi VI DPR RI meminta agar Kerjasama yang sudah dilakukan beberapa antar negara untuk meminta slot agar BUMN terkait bisa memberikan manfaat kepada WNI yang ada diluar negeri.
8. Komisi VI DPR RI Meminta sinergitas komunikasi BUMN yang ada dipusat dan BUMN yang ada di daerah lebih diperhatikan lagi.
9. Komisi VI DPR RI meminta agar PT Bukit Asam, Tbk, untuk mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* tindak lanjut dari Kunjungan Reses Jawa Timur di Tanggal 17 Desember 2021.

KETUA TIM KUNKER RESES KOMISI VI DPR RI

KE PROVINSI JAWA TIMUR

TTD.

FAISOL RIZA, SS

A – 33

H. DOKUMENTASI KEGIATAN

